

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan pesat dalam bidang ekonomi yang dialami pada satu dekade kebelakang telah menjadi momentum dari perubahan sosial, ekonomi dan politik bagi dinamika dalam negeri Tiongkok. Tiongkok dikenal luas sebagai negara yang ‘enggan’ menunjukkan partisipasi internasionalnya secara aktif dengan menjunjung prinsip *non-interference*-nya, prinsip ini telah menjadi pedoman dalam arah kebijakan luar negeri Tiongkok selama lebih dari 60 tahun sejak diresmikannya perjanjian *Panchsheel* atau ‘*Five Principle of Peaceful Coexistence*’ pada tahun 1954 (Ministry of External Affairs Government of India, 2004). Meskipun demikian, proses tersebut kian memudar sejak Xi Jinping mengambil alih kursi kepemimpinan Tiongkok, dengan menggantikan prinsip yang dipegang oleh Deng Xiaoping. Deng Xiaoping memiliki filosofi mengenai posisi Tiongkok dalam kancan internasional yang ia sebut sebagai *Tao Guang Yang Hui* (kembangkan kemampuan namun tetap rendah hati), prinsip ini membawa Tiongkok pada perumusan kebijakan luar negeri yang bersikap moderat dan berhati-hati, tidak ikut campur dalam urusan internal negara lain, tidak mengejar ekspansi, tidak mengejar hegemoni serta konsisten atas ide pembangunan yang damai, atau banyak disebut sebagai *low profile policy* (Clover, 2017; Xuetong, 2014, p. 156; Bader, 2016, p. 7).

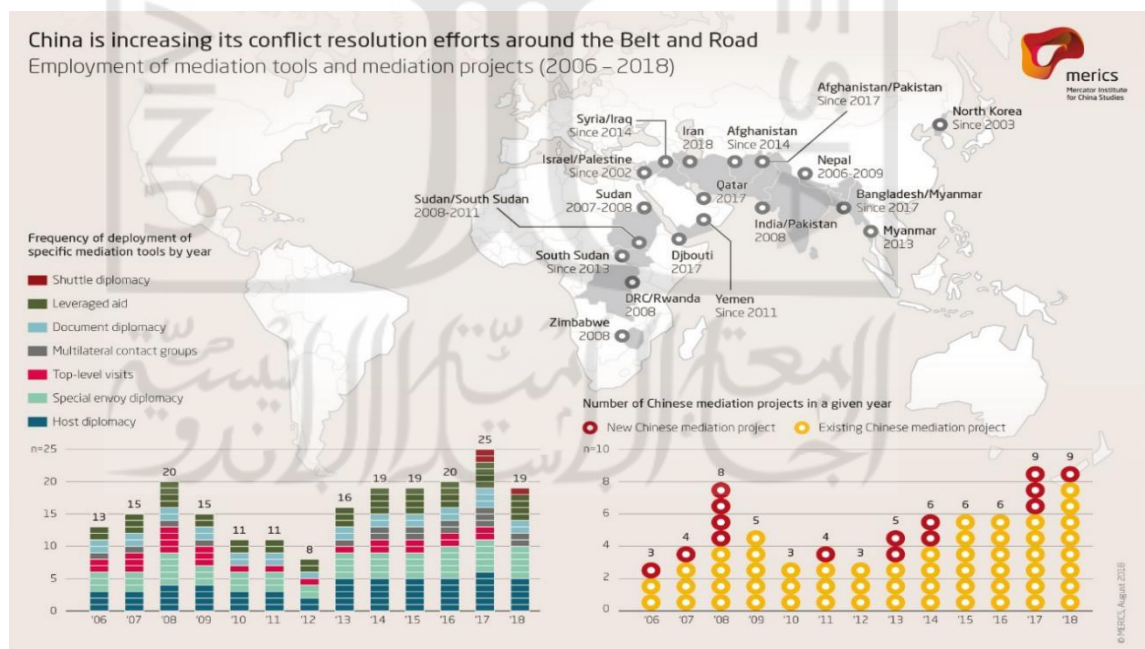
Hal tersebut berbanding terbalik dengan konsepsi yang disampaikan oleh Presiden Xi Jinping, yang dengan tegas menyampaikan era ini adalah waktu yang tepat bagi Tiongkok untuk mengambil peran sentral dan berkontribusi penuh bagi

seluruh umat manusia. Xi Jinping juga menegaskan akan peran dari Tiongkok yang terus bergerak menuju negara kekuatan besar dunia (BBC, 2017; Clover, 2017; Xuotong, 2014, p. 160). Tujuan dari perubahan kebijakan luar negeri Tiongkok tersebut bermula pada sebuah formulasi tentang pembangunan sebuah tatanan masyarakat yang saling terintegrasi. Formulasi ini pada dasarnya bertumpu pada pengembangan sistem internasional dengan memperkuat integrasi ekonomi, dialog, meminimalisir konflik serta meningkatkan keamanan (Thomas, 2018; Imirbaki, 2017). Hal ini ditanggapi oleh Xuotong dalam artikelnya yang melihat bahwa Tiongkok telah bertransformasi dari sebuah negara yang berbasis pada kebijakan *Keeping a Low Profile* (KLP) menuju *Striving for Achievement* (SFA) dibawah pemerintahan Xi Jinping (Xuotong, 2014, p. 166).

Seiring dengan upaya untuk merangkul dunia internasional, Tiongkok mengeluarkan berbagai konsepsi dalam menghadapi era baru dalam hubungan antarbangsa pada abad 21 ini. Didalam sebuah pidato yang disampaikan Wang Yi yang merupakan Menteri Luar Negeri Tiongkok, ia menyampaikan beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam menjalankan pola diplomasi *win-win cooperation*. Salah satu aspeknya ialah dalam bidang keamanan. Ia menambahkan bahwa Tiongkok berupaya untuk aktif berkontribusi dalam mencapai kemandirian regional maupun keamanan internasional (Yi, 2016). Salah satu cara yang dilakukan ialah dengan melakukan upaya mediasi secara proaktif di berbagai konflik yang terjadi di dunia. Meskipun demikian, Tiongkok pada dasarnya memiliki kekhawatiran dalam keterlibatannya pada proses mediasi, hal ini disebabkan karena Tiongkok khawatir proses mediasi tersebut akan gagal, yang kemudian berpengaruh pada penurunan citra Tiongkok dalam upayanya mencapai kekuatan global yang

bertanggung jawab. Hal ini yang kemudian membuat Tiongkok perlu untuk melakukan kalkulasi sebelum memediasi konflik.

Melalui data yang dipublikasi oleh *Mercator Institute for China Studies* (MERICS), diindikasikan terdapat pola peningkatan jumlah konflik yang di mediasi oleh Tiongkok, dari data tersebut MERICS melihat ada korelasi yang cukup signifikan antara upaya mediasi yang dilakukan oleh Tiongkok dengan adanya proyek ambisius yang sedang dijalankan yakni *Belt and Road Initiative* (BRI). Data ini menunjukkan adanya peningkatan upaya mediasi yang cukup signifikan sejak tahun 2013, tahun dimana proyek BRI diluncurkan pertama kali oleh pemerintah Tiongkok. Dalam artikel lain yang ditulis oleh James Bowen juga melihat adanya hubungan yang erat antara rencana pengembangan program BRI dengan upaya Tiongkok untuk mempromsikan perdamaian di berbagai kawasan strategisnya (Bowen, 2017; Hoffmann, 2018).



**Gambar 1.1:** Peningkatan keterlibatan Tiongkok dalam proses mediasi (Hoffmann, 2018).

Dalam hal ini penulis tertarik untuk membahas bagaimana upaya mediasi yang dilakukan oleh Tiongkok dalam kawasan MENA dengan lebih spesifik berfokus pada negara Sudan Selatan. Kawasan MENA sendiri merupakan kawasan strategis yang mulai diperhatikan oleh Tiongkok dimana sektor energi dan infrastruktur merupakan elemen pengikatnya. Pada tahun 2015 Tiongkok telah memberikan sumbangan dana senilai 100 miliar US Dollar pada AIIB, dimana 10 dari 87 anggota AIIB adalah negara-negara regional MENA (Vanni, 2018; Weiss, 2017, p. 8). Pada publikasi yang dikeluarkan oleh Merics diatas juga melihat mengenai adanya pola mediasi yang dilakukan oleh Tiongkok berfokus pada negara yang terkena program BRI. Lebih lanjut, dalam publikasi tersebut juga disinggung mengenai dua negara yang coba di mediasi oleh Tiongkok meski negara tersebut tidak terkena dampak dari program BRI, salah satu negara tersebut ialah Sudan Selatan. Lebih dari pada itu, Sudan Selatan juga dianggap sebagai salah satu negara awal yang coba dimediasi oleh Tiongkok pada era kepemimpinan Xi Jinping. Sehingga menarik untuk melihat bagaimana proses mediasi yang dilakukan oleh Tiongkok serta signifikansi bagi kepentingan nasionalnya (Hoffmann, 2018; International Crisis Group, 2017).

Proses mediasi yang dilakukan oleh Tiongkok pada Sudan Selatan tidak terlepas dari fakta historis tentang konflik di negara tersebut. Sudan Selatan mengalami proses panjang dalam upaya memisahkan diri dengan negara Sudan sejak tahun 1955. Proses panjang tersebut mencapai titik terang pada tahun 2011 ketika referendum berhasil digelar dengan 99,57% warga Sudan Selatan memilih untuk berpisah dengan Sudan, hal ini menjadikan Sudan Selatan sebagai negara termuda di dunia serta menjadikan Salva Kiir dan Riek Machar sebagai presiden

dan Wakil Presiden (BBC, 2011). Tidak lama setelah Sudan Selatan merdeka, negara baru ini mengalami turbulensi politik yang berakhir pada pecahnya perang sipil di negara tersebut. Kejadian ini dilatarbelakangi oleh adanya penyerangan yang terjadi di markas partai yang sedang berkuasa yakni *Sudan People Liberation Army* (SPLA) oleh sekelompok orang yang diduga merupakan kelompok dari Wakil Presidennya yaitu Riek Machar. Salva Kiir kemudian menuduh bahwa Wakilnya ingin melakukan kudeta politik terhadap dirinya (BBC, 2013).

Pasca penyerangan tersebut, terjadi peningkatan tensi antara kedua belah pihak yang berkonflik, hal ini semakin diperparah dengan penggunaan instrumen kekerasan untuk saling menyerang kedua belah pihak. Konflik ini menjadi semakin pelik manakala perang yang terjadi ini juga melibatkan dua etnis terbesar yang ada di Sudan Selatan. Salva Kiir disokong oleh etnis terbesar yakni etnis Dinka, sementara Riek Machar didukung oleh etnis terbesar kedua di Sudan Selatan yakni etnis Nuer. Berdasarkan artikel yang dipublikasi oleh *Center on Foreign Relation* (CFR) mengungkapkan bahwa alasan dari perubahan konflik dari krisis politik menjadi perang sipil dilatarbelakangi oleh instrument kekerasan yang dimiliki Sudan Selatan tidak dilatih secara professional dalam sebuah institusi tentara yang professional. Sehingga pendidikan tentara hanya berbasis pada militansi dan loyalitas terhadap petingginya, dampaknya adalah munculnya kelompok-kelompok tentara yang merepresentasikan dirinya pada etnis tertentu. Hal tersebut membuat tentara di Sudan Selatan terpecah dalam dua kelompok yang mendukung Salva Kiir dan Riek Machar (BBC, 2013; Waal, 2016).

Kejadian tersebut pada akhirnya melatarbelakangi upaya dari Tiongkok untuk memediasi konflik yang terjadi di Sudan Selatan, hal ini dapat dipahami

mengingat Tiongkok memiliki kedekatan hubungan yang cukup baik dengan negara tersebut. Tercatat bahwa Sudan adalah salah satu negara awal yang menjadi persinggahan *China National Petroleum Corporation* (CNPC) ketika membuka investasi luar negeri pertamanya pada tahun 1990-an. Hal tersebut pula yang menjadi awal dari hubungan ekonomi yang terjadi antara Tiongkok dengan Sudan Selatan hingga saat ini. Ketika tahun 2011 Sudan Selatan memutuskan untuk memisahkan diri dengan Sudan, Tiongkok juga menjadi salah satu negara awal yang mengakui Juba sebagai ibukota dari negara Sudan Selatan. Hubungan diplomatik ini kemudian memasuki tahap baru manakala Sudan Selatan mengalami perang sipil pada tahun 2013, hal tersebut langsung ditanggapi oleh Tiongkok yang mulai berupaya untuk melakukan proses mediasi terhadap konflik tersebut (Kuo, 2017).

Selain kedekatan hubungan ekonomi, Tiongkok dan Sudan Selatan sejatinya memiliki hubungan politik yang cukup baik. Artikel yang ditulis oleh Zhang Chun dan Kemple-Hardy menjelaskan bahwa hubungan Tiongkok dengan Sudan Selatan telah berjalan sejak tahun 1959 yang mana ketika itu masih satu bagian dengan Sudan. Zhang dan Hardy menjelaskan bahwa hubungan Tiongkok-Sudan yang kemudian menjadi Tiongkok-Sudan Selatan terbangun pada tiga fase: fase pertama adalah tahun 1950-1995 yang merupakan fase dimana Tiongkok dan Sudan Selatan memiliki hubungan politik yang berdasar pada kesamaan nasib, yaitu bekas kolonial Eropa dan bergerak dalam pembebasan negara dunia ketiga. Fase selanjutnya pada tahun 1966-2005 yaitu masa dimana hubungan Tiongkok-Sudan mulai berkembang melalui hubungan ekonomi, yang bertumpu pada sektor energi. Fase terakhir yakni tahun 2005-sekarang mengacu pada hubungan yang berdasar

pada proses mediasi konflik, perdamaian serta kerjasama keamanan (Kemple-Hardy, 2015, p. 2).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Mengapa Tiongkok melakukan mediasi dalam proses penyelesaian konflik di Sudan Selatan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kepentingan Tiongkok dalam memediasi konflik di Sudan Selatan.
2. Untuk memahami bagaimana proses mediasi yang dilakukan oleh Tiongkok dalam konflik Sudan Selatan.
3. Untuk mengetahui peran Tiongkok dalam proses mediasi konflik antara pemerintah dengan pemberontak di Sudan Selatan.

## **1.4 Signifikansi**

Upaya mediasi merupakan cara yang tergolong baru dalam kebijakan luar negeri Tiongkok, Tiongkok dikenal sebagai negara yang ‘enggan’ dalam mengurus urusan internal negara lain. Namun demikian, seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan klaim Tiongkok sebagai *responsible great power*, maka upaya Tiongkok dalam memediasi konflik di berbagai negara menjadi suatu hal yang tak ter-elakkan. Hal ini juga dilatarbelakangi oleh desakan masyarakat internasional yang menginginkan Tiongkok untuk menggunakan *power*-nya guna berkontribusi dalam perdamaian dunia (Sun S. F., 2019). Pergeseran kebijakan luar negeri

Tiongkok yang semakin proaktif dalam penyelesaian konflik ini penting untuk diteliti guna mengukur perluasan pengaruh Tiongkok di berbagai negara. Hal ini ditunjang dengan fakta bahwa terjadi peningkatan upaya mediasi oleh Tiongkok sejak tahun 2013 dan bukan tidak mungkin proses ini akan terus dikembangkan.

Dalam hal tersebut, analisis mengenai pola-pola mediasi serta motif dari proses mediasi yang dilakukan oleh Tiongkok menjadi penting untuk didalami. Disisi lain, tulisan ini secara spesifik membahas studi kasus tentang proses mediasi Tiongkok di Sudan Selatan, hal ini berdasarkan fakta bahwa Sudan Selatan merupakan salah satu negara awal yang coba dimediasikan oleh Tiongkok pada era kepemimpinan Xi Jinping. Hal ini menjadikan analisis mengenai mediasi yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap Sudan Selatan menjadi penting, mengingat penelitian ini mampu dijadikan acuan mengenai gambaran dari pola mediasi pada konflik yang coba dimediasikan oleh Tiongkok di negara lainnya.

### **1.5. Cakupan Penelitian**

Berdasarkan topik dari pembahasan yang diangkat dalam tulisan ini, penulis mengkategorikan penelitian ini termasuk dalam studi resolusi konflik dan perdamaian. Hal tersebut sesuai dengan fokus dari penelitian ini yang berupaya untuk menganalisis proses mediasi yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap konflik yang terjadi di Sudan Selatan serta kepentingannya dalam proses mediasi tersebut sejak tahun 2014-2018. Dalam perjalanannya, penelitian ini akan menjelaskan mengenai proses interaksi dan pola mediasi yang dilaksanakan oleh Tiongkok. Dalam hal lain, keterlibatan berbagai organisasi regional maupun internasional dalam proses mediasi di Sudan Selatan menimbulkan pertanyaan akan posisi dari



Tiongkok dalam konflik tersebut. Keikutsertaan Tiongkok dalam konflik ini bermula pada tahun 2014 dengan melakukan berbagai pendekatan dengan IGAD, dalam mencapai perdamaian kawasan. Hal ini juga yang melatar belakangi tulisan ini untuk membatasi cakupan penelitian dari tahun 2014 hingga 2018. Lebih lanjut, penelitian ini juga berupaya untuk menelaah posisi Tiongkok sebagai mediator dalam penyelesaian konflik di Sudan Selatan ini. Sejalan dengan hal tersebut, motivasi dari upaya Tiongkok untuk memediasi konflik Sudan Selatan juga memiliki peran yang signifikan dalam menjelaskan posisi Tiongkok sebagai mediator konflik. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, penelitian ini berupaya untuk menganalisis proses mediasi Tiongkok dalam menangani konflik di Sudan Selatan.

## **1.6 Tinjauan Pustaka**

Pola mediasi Tiongkok merupakan salah satu elemen utama dalam penelitian ini. Karakteristik dan motivasi Tiongkok dalam memediasi konflik di Sudan Selatan merupakan hal utama yang ingin di elaborasi pada tulisan ini. Sehingga penting bagi penulis untuk melihat keterlibatan Tiongkok dalam mediasi konflik di berbagai negara lain. Tulisan Mordechai Chaziza memberikan perspektif yang cukup dalam mengenai keterlibatan Tiongkok dalam proses mediasi. Chaziza menyampaikan bahwa dalam banyak kasus, tujuan Tiongkok dalam memediasi konflik di kawasan MENA adalah untuk mencapai pengelolaan konflik secara konstruktif ketimbang resolusi konflik. Ia menambahkan bahwa situasi tidak menentu di kawasan MENA telah membuat Tiongkok meningkatkan perannya sebagai kekuatan besar yang bertanggung jawab, meskipun Chaziza meragukan terjadinya resolusi konflik oleh karena minimnya pengalaman Tiongkok dalam

memediasi. Pada tulisannya, Chaziza juga memberikan beberapa contoh pengelolaan konflik Tiongkok di kawasan MENA, diantaranya ialah konflik Taliban di Afghanistan, konflik Israel-Palestina dan konflik Suriah (Chaziza, 2018).

Dalam penelitian ini penting bagi penulis untuk melihat bagaimana akar dari konflik yang terjadi di Sudan Selatan untuk digunakan sebagai acuan dalam melihat proses mediasi yang dilakukan oleh Tiongkok. *Special report* yang di tulis oleh Kate Almquist Knopf dalam laman *council on foreign relation* secara detail menjabarkan mengenai linimasa proses konflik yang terjadi di Sudan Selatan. Tulisan ini juga memberikan gambaran mengenai tantangan-tantangan yang dialami oleh Sudan Selatan dalam proses perdamaianya. Selain itu, beberapa kritik terhadap situasi yang terjadi di pemerintahan Sudan Selatan juga disoroti dalam tulisan ini; mulai dari ketiadaan legitimasi politik yang kuat, hingga masalah-masalah yang timbul pada proses perdamaian yang sedang dilaksanakan. Analisis mengenai dampak dari konflik berkelanjutan yang terjadi di Sudan Selatan juga berhasil dijabarkan oleh laporan ini dengan memberikan beberapa poin mengenai dampak dari perang tersebut. Tulisan ini berguna bagi penulis dalam melihat proses konflik yang terjadi di Sudan Selatan dan dikorelasikan dengan upaya mediasi yang dilakukan oleh Tiongkok (Knopf, 2016).

Disisi lain, pola interaksi antara Tiongkok dengan Sudan Selatan juga penting dalam kajian ini, guna memahami proses mediasi yang sedang dilakukan oleh Tiongkok. Tulisan karya Daniel Large telah cukup komperhensif dalam menjelaskan tentang bagaimana pola interaksi Tiongkok selama masa krisis yang dialami oleh Sudan Selatan. Tulisan large secara garis besar mencoba untuk melihat berbagai aspek yang menjadi fokus dari hubungan Tiongkok-Sudan Selatan pasca

pecahnya perang sipil pada tahun 2013. Large mengategorikan tulisannya menjadi empat bagian yang ia klasifikasikan sebagai berikut; poin pertama dari Large menitikberatkan pada konteks dari hubungan antara Tiongkok dengan Sudan Selatan pra-konflik pada tahun 2013, poin kedua berfokus pada bagaimana Tiongkok menjalin hubungan dalam bidang keamanan pasca krisis yang melanda Sudan Selatan serta peran Tiongkok dalam *UN Peacekeeping*, poin selanjutnya Large melihat adanya upaya Tiongkok untuk merangkul aspek politik dengan melakukan proses-proses mediasi pada Sudan Selatan, poin terakhir dari Large berfokus pada bagaimana upaya pembangunan Tiongkok yang dilakukan secara beriringan dengan penyelesaian konflik untuk mencapai perdamaian di kawasan tersebut (Large, 2016, pp. 36-48). Meskipun demikian, tulisan ini hanya terbatas pada proses yang terjadi antara tahun 2013-2015. Adapun konflik Sudan Selatan masih terus berangsur hingga akhir 2018.

Lebih dalam, sebuah laporan yang disusun oleh Obert Hodzi yang dipublikasikan dalam laman *Asia Centre* (Hodzi, 2017) memberikan analisa yang penting bagi riset ini mengenai posisi Tiongkok dalam memediasi konflik di Sudan Selatan. Hodzi berargumen bahwa Tiongkok menggunakan strategi yang ia sebut sebagai ‘strategi paralel’ dalam merespon konflik yang terjadi di Sudan Selatan. Strategi paralel yang dimaksud oleh Hodzi ialah bahwa Tiongkok mencoba untuk mengkombinasikan berbagai variabel secara bersamaan. Hodzi menilai beberapa variabel tersebut diantaranya ialah; *non-interference* dengan pragmatism, multilateralisme dengan bilateralisme, serta kekuatan politik dengan mediasi. Hodzi menambahkan bahwa strategi ini digunakan sebagai upaya dari Tiongkok untuk tetap fleksibel dalam kebijakan luar negerinya. Setiap bagian dari argument

Hodzi dijelaskan secara terpisah sehingga memudahkan penulis untuk mengklasifikasikan setiap argumennya. Dalam laporan ini juga memungkinkan penulis untuk mampu melihat gambaran umum dari pola interaksi Tiongkok-Sudan Selatan serta disparitas dari hubungan keduanya. Disisi lain, analisis dari laporan ini juga melihat adanya keterikatan antara proses mediasi Tiongkok dengan kepentingannya dalam bidang perminyakan di Sudan Selatan.

Sejalan dengan analisis yang disampaikan oleh Hodzi, Patey (Patey, 2017, p. 2) menyajikan pendekatan yang lebih spesifik mengenai peran *China National Petroleum Corporation* (CNPC) dalam industry perminyakan di Sudan Selatan serta kaitannya dengan kepentingan Tiongkok di negara tersebut. Patey berargumen bahwa Sudan dan Sudan Selatan memiliki peran penting dari perkembangan perusahaan minyak terbesar di Tiongkok yakni CNPC. Hal ini dijabarkan melalui pendekatan historis tentang bagaimana Sudan memiliki andil dalam proses internasionalisasi CNPC, yang pada kemudian hari CNPC bertransformasi menjadi salah satu perusahaan minyak terbesar di dunia. Artikel ini juga berfokus tentang bagaimana penguasaan Tiongkok dalam industri perminyakan di Sudan dan Sudan Selatan memiliki dampak dalam segi politik di negara tersebut. Berdasarkan penuturan Patey, ia berpendapat bahwa ketidakstabilan politik serta perang sipil yang terjadi di Sudan Selatan telah memberikan pengalaman berharga bagi CNPC dalam menghadapi situasi yang beresiko tinggi. Hal ini berguna bagi pengembangan investasi CNPC pada negara lainnya. Fakta yang disampaikan oleh Patey ini sebetulnya memiliki fokus penting mengenai bagaimana Tiongkok menjadikan Sudan Selatan sebagai '*test ground*' bagi kepentingan ekspansi investasinya. Hal ini penting mengingat pola hubungan antara Tiongkok dengan

Sudan Selatan dianggap bertumpu pada sektor perminyakan, sehingga penting bagi riset ini untuk meninjau sektor tersebut.

Disamping membutuhkan pemahaman mendalam mengenai akar dari konflik yang terjadi di Sudan Selatan serta memahami pola interaksi Tiongkok-Sudan Selatan, penting bagi penulis untuk mengeksplorasi karakteristik dari proses mediasi yang dilakukan oleh Tiongkok. Dalam hal ini tulisan karya Yitzhak Shichor cukup memberikan gambaran mengenai pola interaksi kebijakan luar negeri Tiongkok dalam manajemen konflik yang ia identifikasi menjadi empat opsi. Yang pertama ialah *local level*, mengacu pada pandangan Tiongkok bahwa segala konflik harus diselesaikan secara damai dengan proses diplomasi secara langsung pada kedua belah pihak yang bertikai. Jika tahap pertama gagal, maka *regional level* menjadi opsi kedua. Pada tahap ini Tiongkok mendorong penyelesaian konflik dengan mendorong organisasi internasional untuk aktif memediasi konfliknya. Jika tahap ini tidak berhasil, Tiongkok memiliki kuasa untuk menaikkan keterlibatannya pada *UN level*. Hal ini mengacu pada proses penyelesaian konflik dengan menggunakan intervensi dari *UN Security Council*. Tahap terakhir yang bisa ditempuh menurut Shichor ialah *unilateral level*. Pada tahap ini Tiongkok menganbil tindakan unilateral yang mana hal ini sebetulnya sangat dihindari oleh Tiongkok (Lipson, 2015, p. 2; Shichor, 2013, pp. 28-37).

## **1.7 Kerangka Konseptual**

### ***Konsep Quasi-Mediation Degang Sun dan Yahia Zoubir***

Dalam menganalisis dan menjawab pertanyaan penelitian, penulis menggunakan pendekatan *quasi-mediation* sebagai kerangka kerja untuk meninjau

dan mengelaborasi kasus yang diangkat dalam tulisan ini. Lebih lanjut, penulis menggunakan kerangka kerja *quasi-mediation* yang ditulis oleh Degang Sun dan Yahia Zoubir. Pada konsep ini Sun dan Zoubir berupaya untuk mengelaborasi proses mediasi yang dilakukan oleh negara-negara berkembang, dalam hal ini secara spesifik membahas mengenai proses mediasi Tiongkok di kawasan *Middle East and North Africa* (MENA). Hal tersebut dilakukan oleh karna Sun dan Zoubir merasa bahwa peninjauan mengenai studi mediasi memiliki banyak sekali kelemahan, salah satu hal krusial yang di soroti oleh Sun dan Zoubir ialah tentang bagaimana literatur mengenai mediasi cenderung berfokus kepada ‘standar’ yang dikembangkan oleh negara-negara maju. Sementara sejumlah mediasi yang dilakukan oleh negara-negara berkembang seperti Tiongkok, Qatar, Aljazair atau mediasi yang dilakukan oleh organisasi internasional terkesan tidak dianggap atau diabaikan. (Sun & Zoubir, 2017, p. 3)

Sebelum melangkah lebih jauh dalam mengelaborasi konsep *quasi-mediation*, penulis merasa perlu untuk menjelaskan tentang basis pemahaman mengenai mediasi. Pada artikel yang ditulis oleh Bercovitch dijelaskan bahwa mediasi secara luas didefinisikan sebagai proses manajemen konflik dimana pihak yang berkonflik mencari bantuan, atau menerima tawaran bantuan dari individu, kelompok, negara atau organisasi untuk menyelesaikan konflik yang mereka alami tanpa menggunakan kekuatan militer atau instrument kekerasan lainnya serta tanpa melalui otoritas hukum yang berlaku (Bercovitch, 1991, p. 18). Dalam pemahaman ini, proses mediasi ialah ketika pihak ke tiga bersedia mengajukan atau diajukan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara dua pihak yang bersengketa, tanpa

menggunakan instrument kekerasan. Pihak ketiga dalam hal ini dianggap sebagai pemain yang netral dalam upaya perdamaian yang dijalankannya.

Pada tahap tersebut *quasi-mediation* merupakan bagian dari proses mediasi dimana pihak ke tiga memainkan peran sebagai pihak yang netral, dilakukan oleh individu, kelompok atau negara, serta melakukan penyelesaian konflik tanpa menggunakan instrument militer atau instrument kekerasan lainnya. Meski demikian *quasi-mediation* memiliki deferensiasi yang jelas dengan mediasi formal pada umumnya. Untuk memahami konteks perbedaannya, penulis akan memberikan sedikit variabel mengenai mediasi formal guna mampu memahami perbedaannya. Menurut Bercovitch, mediasi formal biasanya dilakukan oleh pengambil keputusan tingkat tinggi yang seringkali bertindak secara individu untuk menengahi perselisihan antara perwakilan resmi dari kelompok yang berselisih. Proses ini juga biasanya dilakukan melalui struktur yang formal; seperti konferensi, forum politik atau dialog resmi lainnya. Mediasi formal biasanya diletakkan dalam forum diplomatic yang menekankan pada bentuk, prosedur serta hal-hal lain mengenai peran dari pihak ketiga (Bercovitch, 1992, p. 100). Pada tahap itu, mediasi formal menekankan pada proses prosedural dimana pihak ketiga cenderung mendominasi proses perdamaian dengan merancang segala agenda resolusi konflik pada kedua belah pihak serta fokus dalam isu keamanan.

Pendekatan berbeda diterapkan pada proses *quasi-mediation*, pada pendekatan ini menjelaskan tentang proses mediasi yang dilakukan oleh pihak ketiga yang cenderung berupaya untuk mengamankan kepentingan komersial dan pengaruh politiknya ketimbang kepentingan strategis dan keamanannya. Dalam penelitian Sun dan Zoubir juga memperlihatkan tentang bagaimana keikutsertaan

Tiongkok di kawasan MENA bukanlah menggunakan mediasi formal pada umumnya, melainkan menggunakan pendekatan lain yakni *quasi-mediation* yang ditujukan untuk mendapatkan kepentingannya tanpa harus terlalu ikut campur dalam proses mediasi. Pada artikel tersebut juga dijelaskan bahwa *quasi-mediation* merupakan suatu pendekatan yang sangat berhati-hati dalam proses penyelesaian konflik dimana pihak ketiga bersedia untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik namun tidak memainkan peran yang begitu konsekuensial dalam proses mediasi. Hal ini menandakan bahwa pendekatan ini merupakan cara pragmatis yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk mengkapitalisasi proses perdamaian dengan kepentingan nasionalnya (Sun & Zoubir, 2017, p. 4).

Beberapa karakteristik dari *quasi-mediation* yang diidentifikasi dalam artikel Sun dan Zoubir diantaranya adalah:

- a. Pihak ketiga lebih mementingkan kepentingan komersial, politik dan diplomatiknya ketimbang kepentingan strategic dan isu keamanan,
- b. Pihak ketiga lebih bersifat partisipatif ketimbang ingin mendominasi proses perdamaian,
- c. Pihak ketiga lebih kepada ‘mengikuti’ proses perdamaian ketimbang ‘memimpin’,
- d. Pihak ketiga mengemukakan ide-ide konstruktif dalam penyelesaian konflik ketimbang mengatur agenda penyelesaian konflik,
- e. Pihak ketiga mendorong terjadinya de-eskalasi konflik ketimbang resolusi konflik,



- f. Pihak ketiga seringkali menghindar untuk berperan sebagai pemain utama dalam penyelesaian konflik karena resolusi konflik dianggap hanya memberikan sedikit keuntungan,
- g. Pada kasus tertentu, mediator ikutserta dalam penyelesaian konflik secara langsung ketika salah satu pihak yang berselisih tidak bersedia mengikuti proses mediasi. Hal ini disebabkan karena adanya kerugian bila terjadi eskalasi konflik pada kawasan dimana terdapat kepentingan mediator didalamnya (Sun & Zoubir, 2017, p. 4).

Tabel dibawah merupakan gambaran mengenai perbedaan konseptual antara pendekatan mediasi pada umumnya dengan *quasi-mediation*.

**Tabel 1.1 Perbedaan mediasi formal dengan *quasi-mediation***

	<b>Mediasi Formal</b>	<b><i>Quasi-Mediation</i></b>
<b>Basis kepentingan mediator</b>	Keamanan dan kepentingan strategis	Kepentingan komersial, politik dan diplomatic
<b>Prilaku mediator</b>	Pro-aktif	Selektif terhadap beberapa kasus
<b>Posisi mediator</b>	‘Mendominasi’ proses mediasi	‘Mengikuti’ proses mediasi
<b>Peran mediator</b>	‘Memimpin’ proses mediasi	‘Mengikuti’ proses mediasi
<b>Proses mediasi</b>	Mengatur berjalannya kesepakatan	Merevisi/mengkonsultasikan kesepakatan
<b>Komitmen mediator dalam pengerahan sumber daya</b>	Sangat memiliki komitmen tinggi	Memiliki komitmen yang rendah
<b>Tujuan</b>	Resolusi konflik	De-eskalasi konflik

Sumber: (Sun & Zoubir, 2017, p. 17)

Setelah menjelaskan mengenai karakter serta perbedaan mendasar antara mediasi formal dengan *quasi-mediation*, Sun dan Zoubir juga mengidentifikasi faktor-faktor yang memotivasi Tiongkok untuk terlibat dalam proses mediasi di kawasan MENA. Dalam artikel ini dijabarkan mengenai 4 faktor yang memotivasi tindakan Tiongkok di kawasan yang diantaranya ialah;

#### I. Relevan Dengan Kepentingan Komersial

Faktor ini menjelaskan bahwa potensi ekonomi yang dimiliki Tiongkok dalam kawasan konflik mempengaruhi keterlibatan Tiongkok dalam konflik tersebut. Dalam bagian ini dijelaskan bahwa semakin besar kepentingan komersial (ekonomi) Tiongkok di suatu kawasan, maka potensi Tiongkok untuk terlibat dalam mediasi konflik di kawasan tersebut semakin besar. Artikel ini juga menyinggung mengenai kepentingan komersial Tiongkok di kawasan MENA yang diidentifikasi pada tiga hal: Pertama, mengamankan jalur perdagangan minyak serta memastikan stabilitas harga kebutuhan energi dan pasokannya. Kedua, menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan guna mencegah aktor lain untuk memonopoli sumber daya di MENA. Ketiga, menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan serta memastikan tidak adanya ketidakstabilan politik yang dapat mengganggu iklim investasi Tiongkok. Sehingga pada bagian ini menekankan tentang peran kepentingan ekonomi yang memotivasi tindakan Tiongkok untuk memediasi suatu kawasan.

#### II. Jangkauan Pengaruh Tiongkok

Pada bagian ini dijelaskan mengenai hubungan antara Tiongkok dengan para pihak yang berkonflik. Argumen pada bagian ini menyatakan bahwa semakin kuat pengaruh yang bisa Tiongkok jangkau pada pihak yang berkonflik, maka semakin besar potensi Tiongkok untuk terlibat dalam proses damai di kawasan

tersebut. Proses mediasi formal yang dilakukan oleh pihak ketiga biasanya memerlukan keinginan dan sumberdaya yang besar dalam mendorong pengaruhnya pada pihak yang berkonflik. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Jimmy Carter dalam proses damai antara Mesir dengan Israel dimana AS berkomitmen untuk memberikan bantuan ekonomi dan keamanan bagi kedua belah pihak. Hal serupa diragukan akan terjadi pada kasus Tiongkok, Tiongkok dianggap enggan untuk menggelontorkan segala sumberdayanya untuk penyelesaian konflik. Para petinggi pemerintahan Tiongkok bahkan secara terang-terangan mengakui bahwa mereka tidak bisa memberikan sumberdaya yang signifikan dalam konflik di MENA. Oleh karenanya, Tiongkok mengkalkulasi potensi kerjasama yang mampu dijalankan olehnya pada kedua belah pihak yang berkonflik dengan maksud meminimalisir pengeluaran sumberdayanya pada proses penyelesaian konflik.

### III. Keterlibatan Kekuatan Besar Dunia

Keterlibatan actor lain yang memiliki kekuatan besar juga mempengaruhi perhitungan Tiongkok dalam memediasi suatu konflik. Pada bagian ini dijelaskan bahwa semakin besar perhatian kekuatan besar terhadap konflik yang terjadi di suatu kawasan, maka potensi Tiongkok untuk terlibat dalam proses damai di wilayah tersebut juga semakin besar. Sun dan Zoubir berargumen bahwa keputusan Tiongkok untuk tidak secara aktif memediasi konflik bukan hanya karena tidak adanya kepentingan ekonomi di kawasan tersebut, melainkan juga karena konflik tersebut telah gagal dimediasi oleh komunitas internasional (ini berkaitan dengan faktor ke-4 dari motif Tiongkok dalam memediasi konflik yang akan di elaborasi lebih dalam pada bagian ke IV).

Dalam segmen ini diungkapkan bahwa desakan masyarakat internasional terhadap Tiongkok untuk berkontribusi dalam proses perdamaian telah mempengaruhi tindakan Tiongkok untuk memediasi suatu konflik. Hal ini disebabkan oleh upaya Tiongkok untuk menyebarkan pengaruhnya sebagai *responsible great power* dalam konstelasi internasional, terlebih pasca kepemimpinan Presiden Xi Jinping. Sehingga Tiongkok menunjukkan kepeduliannya terhadap isu kemanusiaan dengan melakukan proses perdamaian dalam berbagai konflik meskipun kepentingan ekonominya sangat sedikit. Konflik Israel-Palestina menjadi contoh konkret dari bagaimana Tiongkok berupaya terlibat dalam proses perdamaian meskipun memiliki sedikit kepentingan ekonomi. Meski demikian, Tiongkok tetap memperhitungkan keterlibatan kekuatan besar lainnya dalam penyelesaian konflik guna memastikan proses mampu berjalan dengan baik. Hal ini disebutkan oleh Sun dan Zoubir bahwa Tiongkok memiliki kekhawatiran bahwa proses damai yang ia lakukan akan gagal dan akan memengaruhi citranya sebagai kekuatan regional di kawasan tersebut.

#### IV. Tingkat Kesulitan Dalam Penyelesaian Konflik

Faktor terakhir yang diidentifikasi oleh Tiongkok ialah tingkat kesulitan dalam konflik yang terjadi. Pada bagian ini dijelaskan bahwa semakin mudah konflik untuk bisa diselesaikan, maka semakin besar keinginan Tiongkok untuk melakukan mediasi. Pada tahap ini juga dijelaskan bahwa keterlibatan Tiongkok dalam proses mediasi juga dipengaruhi oleh penilaian para pemangku kebijakan terhadap taraf kesulitan suatu konflik. Secara umum dikatakan bahwa Tiongkok enggan untuk mengekspansi kepentingan diplomatiknya dalam proses penyelesaian konflik jika kasus yang dihadapi merupakan kasus yang sulit untuk

diselesaikan. Begitupun sebaliknya, semakin pihak yang berkonflik memiliki keinginan untuk resolusi maka semakin kuat keinginan Tiongkok dalam memediasi konflik tersebut. Dapat dilihat bahwa upaya Tiongkok dalam proses perdamaian sangat memperhitungkan *cost and benefit* dari konflik tersebut (Sun & Zoubir, 2017, pp. 8-14).

Selain dari beberapa faktor diatas, tulisan Sun dan Zoubir juga memetakan mengenai kategori-kategori dari proses *quasi-mediation* yang dilakukan oleh Tiongkok di kawasan MENA. Dalam artikelnya diidentifikasi bahwa terdapat empat kategori dari proses *quasi-mediation* yakni *multifaceted intervention*, *proactive involvement*, *limited intercession* dan *indirect participation*. Pemetaan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keterlebatan Tiongkok dalam proses penyelesaian konflik diatas merupakan pedoman bagi penulis dalam mengeksplorasi kepentingan serta proses yang dijalankan oleh Tiongkok dalam memediasi konflik di Sudan Selatan. Adapun karakteristik mengenai *quasi-mediation* yang telah disebutkan diatas berguna sebagai alat untuk mengidentifikasi pola interaksi serta karakteristik dari proses mediasi Tiongkok di Sudan Selatan.

### **1.8 Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis memahami pentingnya tinjauan literatur, data-data penunjang serta penelitian sejenis guna memberikan pemahaman yang mendalam dalam proses penelitian. Lebih dari itu, tinjauan data-data yang relevan memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengeksplorasi fenomena yang sedang diteliti. Dalam hal tersebut, penulis menggunakan metode kualitatif guna menganalisis pertanyaan penelitian dalam tulisan ini. Metode kualitatif

memberikan kesempatan bagi penulis untuk secara mendalam menganalisis proses mediasi yang dilakukan oleh Tiongkok di Sudan Selatan beserta dengan kepentingannya. J. R. Raco dalam bukunya menjelaskan bahwa tujuan dari penggunaan metode kualitatif adalah untuk mencari pengertian atau jawaban yang dari suatu pertanyaan secara mendalam mengenai suatu fakta, peristiwa atau fenomena tertentu. Raco menambahkan bahwa kedalaman dalam menjelaskan suatu fenomena adalah karakteristik utama dari penelitian kualitatif (Raco, 2010, p. 2). Dalam hal ini penulis merasa bahwa dalam rangka menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian dari tulisan ini, metode kualitatif adalah pendekatan yang paling tepat dalam menganalisis fenomena tersebut.

Adapun dalam penelitian ini penulis menelusuri berbagai sumber guna menemukan data-data penunjang yang mampu membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Data-data penunjang yang dimaksud termasuk kedalam data primer maupun data sekunder. Dalam proses pengambilan data primer, penulis menggunakan laporan-laporan maupun artikel yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun instansi terkait baik dari pihak Tiongkok ataupun Sudan Selatan. Disamping itu, penulis juga menggunakan data sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, artikel berita serta laporan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga penelitian yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian yang penulis gunakan bersifat deskriptif dan analisis. Pengumpulan data sejalan dengan upaya penulis dalam menjelaskan fenomena yang terjadi, penggambaran fenomena akan diakhiri dengan sebuah analisis yang pada akhirnya akan menemukan sebuah kesimpulan dari pertanyaan penelitian.

## **1.9 Proses Penelitian**

### **1.9.1 Pra Riset**

Proses ini mencakup pada kegiatan penggalan informasi mengenai topik yang ingin dibahas dalam sebuah penelitian. Hal ini juga diiringi dengan pematangan ide mengenai topik yang ingin dibawakan dalam penelitian.

### **1.9.2 Identifikasi Masalah**

Proses ini mencakup pada penggalan masalah yang biasanya diawali dengan pertanyaan reflektif mengenai isu kontemporer atau isu yang sedang banyak diperbincangkan. Proses ini juga mencakup pada pendalaman beberapa elemen diantaranya ialah: Signifikansi dari penelitian, fakta mengenai fenomena yang akan diteliti, perkembangan fenomena yang ingin diteliti, nilai tambah penelitian terhadap penelitian serupa lainnya, hingga kontribusi apa yang bisa dicapai dalam penelitian yang ingin dikerjakan.

### **1.9.3 Pengumpulan Data**

Pengumpulan data mengacu pada proses seleksi dan identifikasi data yang sesuai dengan kepentingan penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan sumber primer dan sekunder dalam penelitian ini. Sumber primer didapat melalui laporan atau artikel yang dikeluarkan oleh pemerintah atau instansi terkait, baik pemerintah Tiongkok maupun pemerintah Sudan Selatan. Sumber sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel berita hingga laporan yang di disseminasikan oleh lembaga penelitian yang kredibel.

### **1.9.4 Analisis Data**

Proses ini dilakukan pasca pengumpulan data, tahap ini adalah tahap yang paling krusial dimana proses analisis data mampu mempengaruhi hasil dari

penelitian ini. Adapun proses analisis data diawali dengan menyiapkan data-data terkait yang relevan dengan topik dari penelitian, tahap selanjutnya adalah membaca atau memahami isi dari data tersebut yang kemudian akan dituangkan dalam sebuah penelitian, tahap berikutnya adalah proses pelabelan data yang kemudian direlevansikan dengan topik yang diangkat dalam penelitian, tahap terakhir ialah interpretasi data dimana analisis dari pengumpulan data tersebut ditinjau menggunakan konsep guna mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian,

